

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perekonomian suatu negara tidak akan pernah lepas dari inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum (Budiono, 2001). Kenaikan harga barang terus menerus akan membawa dampak buruk negatif bagi perekonomian nasional bahkan individu. Hal ini disebabkan karena kenaikan harga secara terus menerus mengakibatkan ketidamampuan masyarakat untuk menjangkau harga dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Selain bagi individu, dampak inflasi ini bagi perekonomian negara juga tidak terlalu baik, apabila tingkat inflasi menjadi tinggi yang tanpa diimbangi oleh peningkatan pendapatan nominal masyarakat, dapat menyebabkan pendapatan riil rakyat semakin merosot. Juga, pendapatan per kapita penduduk merosot relatif sangat cepat, yang mengakibatkan Indonesia kembali masuk dalam golongan negara miskin. Hal ini telah menyebabkan semakin beratnya beban hidup masyarakat, khususnya pada masyarakat strata ekonomi bawah.

Seperti pada peristiwa inflasi di tahun 2005 dan 2008 yang bersumber dari kejutan berasal dari eksternal karena kenaikan harga-harga komoditas global baik komoditas energi maupun pangan. Kenaikan harga minyak dunia telah mendorong pemerintah untuk menaikkan harga BBM secara rata-rata hingga 28,7%. Selain memberikan dampak langsung terhadap inflasi, dampak lanjutannya juga turut mendorong laju inflasi (Harmanta, 2009). Pada tahun-tahun tersebut inflasi sendiri

mencapai nilai 17,11% pada Desember 2005 dan 11,06% pada Desember 2008. Tentunya hal ini sangat mengguncang perekonomian baik secara nasional maupun individu.

Dalam rangka mengatasi permasalahan inflasi yang terjadi, pemerintah membutuhkan kebijakan yang tepat dalam mengendalikan pergerakan inflasi. Untuk itu pada tahun 2005 ditetapkan kebijakan tentang target inflasi berupa *Inflation Targeting Framework*. Implementasi *inflation targeting* di Indonesia, sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 2000, meskipun secara formal baru dilaksanakan mulai tahun 2005. Implementasi *Inflation Targeting Framework* (ITF) pada tahun 2005 menjadi tonggak sejarah perubahan kerangka kebijakan moneter yang dilakukan pasca krisis ekonomi di Indonesia. Pada prinsipnya kerangka kebijakan moneter tersebut adalah dalam rangka mengadopsi kerangka kebijakan yang lebih kredibel, yang mengacu pada penggunaan suku bunga sebagai operational target dan kebijakan yang bersifat antisipatif.

Dari sisi tingkat inflasi yang ingin dicapai, kebijakan moneter tersebut diarahkan untuk mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan menurun secara gradual menuju tingkat yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan (Arimurti, 2011). Sementara itu, asesmen mengenai perilaku inflasi yang diperlukan antara lain terkait dengan persistensi inflasi atau kecepatan tingkat inflasi untuk kembali ketingkat ekuilibriumnya setelah timbulnya suatu *shock* (Marques, 2005).

Persistensi inflasi didefinisikan sebagai kecepatan tingkat inflasi untuk kembali ketingkat ekuilibriumnya setelah timbulnya suatu *shock* (Marques, 2005). Derajat persistensi yang tinggi menunjukkan lambatnya tingkat inflasi ke tingkat alamiahnya. Sebaliknya derajat persistensi yang rendah menunjukkan cepatnya tingkat inflasi untuk kembali ke tingkat alamiahnya. *Shock* dimaksud antara lain dapat berupa kebijakan pemerintah, gangguan distribusi, bencana alam dan perubahan cuaca. Reaksi yang diberikan dalam mengatasi perubahan/*shock* dan perencanaan kedepan memerlukan pengetahuan yang memadai mengenai seberapa besar dan lama *shock* yang terjadi mempengaruhi perekonomian. Semakin kecil tingkat persistensi inflasi, semakin singkat waktu yang dibutuhkan untuk stabilisasi inflasi setelah *shock* yang terjadi.

. Beberapa penelitian telah dilakukan untuk melihat persistensi inflasi di Indonesia. Hasil studi Yanuarti (2007) dan Alamsyah (2008) misalnya menyimpulkan bahwa derajat persistensi inflasi di Indonesia secara umum sangat tinggi namun cenderung menurun pada periode setelah krisis. Sementara itu, Harmanta (2009) menyatakan bahwa persistensi inflasi yang bersifat *backward looking* pada era ITF mengalami penurunan, sementara yang bersifat *forward looking* mengalami peningkatan. Untuk studi kasus di luar negeri, penelitian yang dilakukan oleh Batini (2002) membahas tiga tipe persistensi inflasi, yaitu *positive serial correlation in inflation, lags between systematic monetary policy actions and their (peak) effect on inflation, lagged responses of inflation to non-systematic policy actions*.

Pengamatan untuk kasus Indonesia menunjukkan bahwa kredibilitas kebijakan moneter di Indonesia relatif rendah, dan ini menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tingginya persistensi inflasi (Harmanta, 2009). Rendahnya kredibilitas kebijakan moneter ini dapat menimbulkan dampak yang tidak baik bagi pertumbuhan perekonomian di Indonesia sendiri. Selain memunculkan konflik di dalam negeri seperti demonstrasi akibat menentang kesenjangan yang terjadi karena kesejahteraan yang menurun, juga dapat menimbulkan krisis ekonomi dalam negeri karena tingginya harga akibat inflasi tidak diimbangi dengan pendapatan yang layak.

Kajian mengenai fenomena persistensi menjadi sangat penting untuk dilakukan dalam rangka mendukung perumusan kebijakan moneter yang efektif. Hal ini dikarenakan agar efektifitas kebijakan moneter dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Inflasi yang tinggi akan memberikan dampak negatif terhadap perekonomian. Daya beli masyarakat menurun dan pelaku dunia usaha akan diliputi ketidakpastian yang tinggi.

Kajian tersebut pada akhirnya diperlukan untuk merumuskan strategi pengendalian inflasi. Sumber tekanan inflasi yang menyebabkan persistensi inflasi perlu dianalisa secara lebih tajam sehingga dapat dibedakan sumber tekanan inflasi yang bersifat fundamental dan yang hanya bersifat sementara atau temporer. Kebijakan moneter tidak dapat digunakan sepenuhnya untuk merespon tekanan inflasi dari kejutan di sisi pasokan. Adanya permasalahan ini yang melatarbelakangi penyusunan skripsi dengan judul “ **Analisa Tingkat Persistensi**

Inflasi dan Implikasinya terhadap Kebijakan Pengendalian Inflasi di Indonesia Tahun 2005-2012”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana derajat tingkat persistensi inflasi di Indonesia pada periode 2005-2012?
2. Bagaimanakah hubungan dari persistensi inflasi terhadap kebijakan moneter yang terjadi di Indonesia pada periode 2005-2012?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui tingkat persistensi inflasi di Indonesia pada periode 2005-2012.
2. Mengetahui implikasi dari fluktuasi tingkat persistensi inflasi terhadap kebijakan moneter yang terjadi di Indonesia pada periode 2005-2012.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran terhadap seberapa besar tingkat persistensi inflasi dan implikasinya terhadap kebijakan pengendalian inflasi di Indonesia.
2. Penelitian ini diharapkan sebagai informasi bagi lembaga-lembaga terkait dalam menentukan kebijaksanaannya yang berkaitan dengan pengendalian inflasi yang terjadi di Indonesia.

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika dalam skripsi ini akan tersusun sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat pengantar secara garis besar mengenai hal yang akan dibahas dalam skripsi ini, yaitu meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat uraian tentang landasan teori yang telah diperoleh penulis selama perkuliahan maupun literature-literatur yang dijadikan pedoman dan pembahasan dalam skripsi ini. Selanjutnya pada bagian ini disampaikan hipotesis dan model analisis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Memuat uraian tentang identifikasi variable, definisi operasional variable, jenis dan sumber data, prosedur pengumpulan data serta teknik analisis.

BAB IV : PEMBAHASAN

Berisikan gambaran umum, hasil penelitian yang disertai pula dengan pembahasan dengan hasil akhir pengolahan data.

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

Merupakan bagian akhir skripsi yang berisikan simpulan serta saran hasil penelitian.